BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

LAPORAN KINERJA

Balai Diklat Keuangan Manado
Triwulan IV Tahun 2020

EXECUTIVE SUMMARY

1. Pada bulan Januari tahun 2020, Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Manado telah menandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2020 yang berisi target kinerja yang harus dicapai hingga akhir tahun 2020. Sampai dengan akhir Triwulan IV, dari total 13 Indikator Kinerja Utama (IKU), 12 IKU telah memenuhi targetnya (Hijau) dan 1 IKU lainnya tidak memenuhi target capaiannya (Kuning).
2. Capaian IKU BDK Manado yang telah memenuhi target sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik dengan realisasi persentase sebesar 100% dari target 93%.
 - b. Indeks kepuasan pengguna layanan dengan realisasi indeks sebesar 4.41 dari 4.
 - c. Indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran dengan realisasi indeks sebesar 4.66 dari target 4.33.
 - d. Persentase penyelesaian rekomendasi pelatihan yang ditindaklanjuti dengan realisasi 100% dari target 100%.
 - e. Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran dengan realisasi indeks sebesar 5 dari target 4.
 - f. Persentase efisiensi belanja birokrasi dengan realisasi indeks sebesar 47.49% dari target 10%.
 - g. Indeks efektivitas forum group discussion kebijakan Kementerian Keuangan dengan realisasi indeks sebesar 93.2 dari target 80.
 - h. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dengan realisasi sebesar 107% dari target sebesar 79%.
 - i. Persentase implementasi inovasi dengan realisasi persentase sebesar 100% dari target 100%.
 - j. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan realisasi persentase 97.75% dari target 95%
 - k. Rasio utilisasi BMN dengan realisasi sebesar 103.64% dari target 100%.
 - l. Persentase pemenuhan basis data aplikasi Semantik dengan realisasi persentase sebesar 108% dari target 100%.
3. Capaian IKU BDK Manado yang tidak memenuhi target hingga akhir Triwulan IV Tahun 2020 adalah Indeks persepsi integritas dengan realisasi sebesar 87.72

dari target 90.10.

4. Anggaran BDK Manado untuk Output Lulusan Pembelajaran di Daerah berjumlah Rp 1,264,856,000. Sampai dengan akhir Triwulan IV, realisasi anggaran adalah Rp 1,063,639,840 atau capaian 85,61%. Anggaran pada output layanan pembelajaran di daerah tersebut direncanakan untuk membiayai 12 pelatihan namun 5 pelatihan diantaranya dibatalkan (salah satu diantaranya menggunakan DIPA Pusdiklat Pajak), seminar yang terdiri dari 5 open class, dan administrasi pembelajaran lainnya. Anggaran untuk suboutput Lulusan Pelatihan Orientasi Asrama Eksternal telah memiliki realisasi namun tidak ada output lulusan pelatihan dikarenakan realisasi tersebut dilakukan atas pengadaan ATK peserta pelatihan sebelum pengumuman pembatalan pelatihan diterima oleh BDK Manado.
5. Anggaran BDK Manado untuk Output Lulusan Pembelajaran di Daerah berjumlah Rp 1,264,856,000. Sampai dengan akhir Triwulan IV, realisasi anggarannya adalah Rp 1,063,639,840 atau capaian 84.09%.
6. Anggaran yang telah terserap untuk Output Dokumen Manajemen Pengetahuan adalah sebesar Rp 11,580,000 dari total anggaran sebesar Rp 28,700,000 atau realisasi sebesar 40.35%.
7. Alokasi anggaran untuk Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal berjumlah Rp 1,892,553,000. Pada Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 1,878,225,965 atau 99.24%.
8. Anggaran BDK Manado untuk Output Layanan Dukungan Manajemen Satker berjumlah Rp 98,990,000. Hingga akhir Triwulan IV, anggaran yang terealisasi adalah sebesar 50.38% atau sebesar Rp 49,873,355.
9. Anggaran BDK Manado untuk Output Layanan Perkantoran berjumlah Rp 2,948,976,000. Hingga akhir Triwulan IV, anggaran yang telah terealisasi adalah sebesar Rp 2,846,984,836 atau sebesar 96.54%.
10. Sampai dengan akhir Triwulan IV, Balai Diklat Keuangan Manado telah menyelenggarakan 7 pelatihan dari rencana 7 pelatihan.
11. BDK Manado telah melaksanakan 8 *open class* dari rencana 5 *open class* hingga akhir Triwulan IV.
12. Telah terealisasi peserta sejumlah 3301 peserta dari total rencana 617 peserta termasuk peserta *open class*.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan Manado merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Balai Diklat Keuangan Manado mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan, penataran keuangan negara dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Penyusunan Laporan Kinerja Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 untuk memberikan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dan selanjutnya diharapkan adanya saran-saran dalam rangka pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di Balai Diklat Keuangan Manado.

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat Keuangan Manado periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, disusunlah Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2020. Laporan ini berisi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan serta pencapaian kinerja Balai Diklat Keuangan Manado.

Demikian laporan ini kami susun semoga bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dalam penyempurnaan penyusunan di masa mendatang.

Manado, Januari 2021
Plt. Kepala Balai,

Ditandatangani secara elektronik
Rahmad Gendro Legowo

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR DIAGRAM	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA	4
A. KONTRAK KINERJA BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO TAHUN 2020.....	4
B. KEGIATAN.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	9
B. PELAKSANAAN DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN.....	14
C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	17
BAB IV PENUTUP	37
A. SIMPULAN.....	37
B. SARAN.....	38
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KONTRAK KINERJA KEPALA BDK MANADO TAHUN 2020

LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI JAMLATOR TRIWULAN IV TAHUN 2020

LAMPIRAN III

REALISASI DIKLAT BDK MANADO TRIWULAN IV TAHUN 2020

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2020	6
Tabel 2.2	Revisi I Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2020	6
Tabel 2.3	Revisi II Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2020	7
Tabel 3.1	Realisasi Belanja Per Output BDK Manado s.d. Triwulan IV Tahun 2020.....	9
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Per Sub Output Lulusan Pembelajaran di Daerah s.d. Triwulan IV Tahun 2020.....	11
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Per Pelatihan s.d. Triwulan IV Tahun 2020...	11
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran per Komponen Output Layanan Dukungan Manajemen Satker s.d. Triwulan IV Tahun 2020	13
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran per Komponen Output Layanan Perkantoran s.d. Triwulan IV Tahun 2020.....	14
Tabel 3.6	Rencana dan Realisasi Keluaran Kegiatan s.d. Triwulan IV Tahun 2020.....	14
Tabel 3.7	Rencana dan Realisasi per Komponen Output Lulusan Pembelajaran di Daerah s.d. Triwulan IV Tahun 2020.....	15
Tabel 3.8	Jumlah Peserta per Diklat s.d. Triwulan IV Tahun 2020	15
Tabel 3.9	Rencana dan Realisasi per Komponen dan Sub Komponen Output Layanan Dukungan Manajemen Satker s.d. Triwulan IV Tahun 2020.....	17
Tabel 3.10	Rencana dan Realisasi per Komponen Output Layanan Perkantoran s.d. Triwulan IV Tahun 2020.....	17
Tabel 3.11	Target dan Capaian IKU BDK Manado s.d. Triwulan IV Tahun 2020.....	18

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Realisasi Belanja Per Output s.d. Triwulan IV Tahun 2020	12
Diagram 3.2	Penyerapan Anggaran Pelatihan s.d. Triwulan IV Tahun 2020..	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diubah menjadi Laporan Kinerja. Setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Salah satu tahapan dalam penyelenggaraan SAKIP adalah pelaporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja antara lain:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Balai Diklat Keuangan Manado sebagai entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun Laporan Kinerja interim maupun tahunan. Selain untuk memenuhi kewajiban tersebut, Balai Diklat Keuangan Manado yang adalah unit pelaksana teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maka laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban formal kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selama periode Januari sampai dengan Desember tahun 2020.

B. TUGAS DAN FUNGSI BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO

Balai Diklat Keuangan Manado, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, merupakan unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Balai Diklat Keuangan Manado mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara;
3. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara;
4. Pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Balai Diklat;
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Balai Diklat;
6. Pengembangan SDM Balai Diklat;
7. Pengelolaan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
8. Pelaksanaan administrasi Balai Diklat.

C. STRUKTUR ORGANISASI BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO

Struktur Organisasi Balai Diklat Keuangan Manado saat ini terdiri atas:

1. Kepala Balai Diklat Keuangan Manado
2. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
3. Kepala Seksi Penyelenggaraan
4. Kepala Seksi Evaluasi dan Informasi
5. Fungsional Widyaiswara

Dengan bagan organisasi sebagai berikut:

**BAGAN ORGANISASI
BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO**

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

Sebagai suatu entitas akuntabilitas kinerja, Balai Diklat Keuangan Manado memiliki visi untuk menjadi pengelola diklat terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan terbaik di daerah. Visi tersebut mengarahkan seluruh komponen Balai Diklat Keuangan Manado agar memiliki gambaran/cita-cita yang sama dalam pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, pengkoordinasian pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, serta mendorong inovasi ke depan. Agar visi tersebut dapat diwujudkan, maka dirumuskan sasaran-sasaran strategis sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan dan dicapai organisasi. Untuk memastikan bahwa sasaran strategis tersebut dapat dicapai, maka perlu dilakukan manajemen atas resiko kegagalan pencapaian sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur oleh indikator kinerja utama (IKU). Setiap IKU disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai. Untuk mencapai target IKU, dapat dilaksanakan kegiatan terobosan yang disebut Inisiatif Strategis (IS).

A. KONTRAK KINERJA BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO TAHUN 2020

1. Peta Strategi BDK Manado Tahun 2020

2. Kontrak Kinerja Kepala BDK Manado Tahun 2020

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Tata kelola dan sumber daya Kementerian yang optimal	1a-CP	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%
		1b-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4 (skala 5)
2.	Proses pembelajaran yang efektif	2a-N	Indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran	4,33 (skala 5)
3.	Evaluasi kinerja konstruktif	3a-N	Persentase penyelesaian rekomendasi pelatihan yang ditindaklanjuti	100%
4.	Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif	4a-CP	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4 (skala 5)
5.	Organisasi dan SDM yang optimal	5a-CP	Persentase efisiensi belanja birokrasi	10%
		5b-CP	Indeks persepsi integritas	90,10 (skala 100)
		5c-N	Indeks efektivitas <i>forum group discussion</i> kebijakan Kementerian Keuangan	80 (skala 100)
		5d-N	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai	79%
		5e-N	Persentase implementasi inovasi	100%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	6a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%
		6b-N	Rasio utilisasi BMN	100%
7.	Sistem manajemen informasi yang andal	7a-N	Persentase pemenuhan basis data aplikasi Semantik	100%

Kegiatan

Anggaran

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah – BDK Manado Rp 6.484.075.000,00

B. KEGIATAN

Untuk tahun anggaran 2020 Balai Diklat Keuangan Manado memperoleh DIPA sebesar Rp 6,484,075,000, yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada.

Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keuangan Manado selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado
Tahun Anggaran 2020

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusediklat
		Mulai	Selesai			
1	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I	12-Feb	4-Mar	22	60	PSDM
		12-May	13-May	2		
2	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode II	10-Mar	1-Apr	23	60	PSDM
		16-Jun	17-Jun	2		
3	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode III	7-Apr	29-Apr	23	60	PSDM
		21-Jul	22-Jul	2		
4	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	22-Jun	26-Jun	5	28	AP
5	Pelatihan Teknis Orientasi Pegawai DJP Angkatan I	30-Jun	9-Jul	10	58	Pajak
6	Lokakarya Pengelolaan Uang Persediaan bagi Bendahara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak	1-Jul	2-Jul	2	24	AP
7	Pelatihan Teknis Manajemen Pengendalian Mutu Pemeriksaan	6-Jul	10-Jul	5	32	Pajak
8	Pelatihan Teknis Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak	6-Jul	10-Jul	5	32	Pajak
9	Pelatihan Teknis Orientasi Pegawai DJP Angkatan II	14-Jul	23-Jul	10	58	Pajak
10	Pelatihan Teknis Penyuluh Perpajakan Angkatan I	13-Jul	17-Jul	5	30	Pajak
11	Pelatihan Pengelolaan Kinerja	10-Aug	12-Aug	3	17	KU
12	Pelatihan Teknis Penyuluh Perpajakan Angkatan II	10-Aug	14-Aug	5	30	Pajak
13	Lokakarya Penanganan Perkara DJP-DJBC	1-Sep	2-Sep	2	30	Pajak

Tabel 2.2
Revisi I Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado
Tahun Anggaran 2020

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusediklat
		Mulai	Selesai			
1	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I	12-Feb	4-Mar	22	60	PSDM
		12-May	13-May	2		

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusdiklat
		Mulai	Selesai			
2	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode II	10-Mar	1-Apr	23	60	PSDM
		16-Jun	17-Jun	2		
3	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode III	7-Apr	29-Apr	23	60	PSDM
		21-Jul	22-Jul	2		
4	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	22-Jun	26-Jun	5	28	AP
5	Pelatihan Teknis Orientasi Pegawai DJP Angkatan I	30-Jun	9-Jul	10	58	Pajak
6	Lokakarya Pengelolaan Uang Persediaan bagi Bendahara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak	1-Jul	2-Jul	2	24	AP
7	Pelatihan Teknis Penyuluh Perpajakan Angkatan I	13-Jul	17-Jul	5	30	Pajak
8	Pelatihan Teknis Orientasi Pegawai DJP Angkatan II	14-Jul	23-Jul	10	58	Pajak
9	Lokakarya Optimalisasi Pemanfaatan Data Sektor Kehutanan	22-Jul	24-Jul	5	30	Pajak
10	Pelatihan Pengelolaan Kinerja	10-Aug	12-Aug	3	17	KU
11	Pelatihan Teknis Penyuluh Perpajakan Angkatan II	10-Aug	14-Aug	5	30	Pajak
12	Lokakarya Penanganan Perkara DJP-DJBC	1-Sep	2-Sep	2	30	Pajak

Tabel 2.3

Revisi II Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2020

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusdiklat
		Mulai	Selesai			
1	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I	12 Feb	4 Mar	22	62	PSDM
		12 Mei	13 Mei	2		
2	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode II	10 Mar	18 Apr	23	62	PSDM
		7 Jul	8 Jul	2		
3	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode III	11 Agu	2 Sep	23	62	PSDM
		20 Oct	21 Oct	2		
4	Pelatihan Teknis Penyuluh Perpajakan Angkatan I	10 Agu	14 Agu	5	30	Pajak
5	Lokakarya Optimalisasi Pemanfaatan Data Sektor Kehutanan	2 Nov	5 Nov	5	30	Pajak
6	Pelatihan Teknis Penyuluh Perpajakan Angkatan II	7 Sep	11 Sep	5	30	Pajak
7	Lokakarya Penanganan Perkara DJP-DJBC	1 Sep	2 Sep	2	30	Pajak

Output yang harus dipenuhi Balai Diklat Keuangan Manado pada tahun 2020 adalah sejumlah 5 Output, yaitu:

a. Lulusan Pembelajaran di Daerah

Terdiri dari:

1. Lulusan Pelatihan Prajabatan (Pelatihan Dasar CPNS)
2. Lulusan Pelatihan Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Internal di Daerah
3. Lulusan Pelatihan Orientasi Asrama Eksternal
4. Peserta *Knowledge Sharing*

b. Dokumen Manajemen Pengetahuan

Terdiri dari:

1. Dokumentasi Pengetahuan (*Knowledge Captures*)

c. Layanan Sarana dan Prasarana Internal;

d. Layanan Dukungan Manajemen Satker;

1. Tanpa Sub Output

e. Layanan Perkantoran;

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang diterima Balai Diklat Keuangan Manado di awal tahun berdasarkan DIPA nomor DIPA-015.11.2.636799/2020 tanggal 12 November 2019 adalah sebesar Rp 7,558,682,000. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah dengan output yang terdiri dari Lulusan Pembelajaran di Daerah, Dokumen Manajemen Pengetahuan, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Dukungan Manajemen Satker dan Layanan Perkantoran. Dalam perkembangannya terjadi tiga kali revisi anggaran. Revisi terakhir yaitu pada tanggal 29 November 2020, anggaran Balai Diklat Keuangan Manado berubah pada revisi 7 yaitu sebesar 6,234,075,000.

Sampai dengan 31 Desember 2020 (Triwulan IV Tahun 2020), Balai Diklat Keuangan Manado telah menyerap anggaran sebanyak Rp 5,869,566,496 atau sebesar 94.15% dari total anggaran. Rincian realisasi dan diagram dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Diagram 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Realisasi Belanja per Output BDK Manado
s.d. Triwulan IV Tahun 2020

Kegiatan/Output		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Saldo (Rp)
1		2	3	$4=(3/2) \times 100\%$	$5=2-3$
1731	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara di Daerah	6,234,075,000	5,869,566,496	94.15%	363,252,429
1731.502	Lulusan Pembelajaran di Daerah	1,264,856,000	1,082,902,340	85.61%	181,953,660
1731.632	Dokumen Manajemen Pengetahuan	28,700,000	11,580,000	40.35%	17,120,000
1731.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,892,553,000	1,878,225,965	99.24%	13,070,960
1731.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	98,990,000	49,873,355	50.38%	49,116,645
1731.994	Layanan Perkantoran	2,948,976,000	2,846,984,836	96.54%	101,991,164

Diagram 3.1
Realisasi Belanja per Output
s.d. Triwulan IV Tahun 2020

Berikut ini akan disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian anggaran serta permasalahan yang dihadapi dari masing-masing output yang telah dilaksanakan oleh BDK Manado selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

a. Lulusan Pembelajaran di Daerah

Anggaran yang telah terserap untuk Output Lulusan Pembelajaran di Daerah adalah sebesar Rp. 1,082,902,340 dari total anggaran sebesar Rp 1,264,856,000 atau realisasi sebesar 85.61%. Anggaran pada output Lulusan Pembelajaran di Daerah tersebut pada awalnya direncanakan untuk membiayai 617 peserta pada 12 pelatihan sedangkan anggaran pada output Peserta Knowledge Sharing direncanakan untuk membiayai 5 *open class* yang terdiri dari 150 peserta. Namun dikarenakan perubahan kalender diklat, maka terjadi perubahan jumlah pelatihan yang direncanakan per Triwulan IV menjadi 7 pelatihan. Rincian realisasi anggaran per suboutput dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran per Suboutput
Lulusan Pembelajaran di Daerah
s.d. Triwulan IV Tahun 2020

Kode	Output/Suboutput	Anggaran			
		Rencana	Realisasi	% Capaian	Saldo
1	2	3	4	5=(4/3)X100%	6=3-4
1731.502	Lulusan Pembelajaran di Daerah	1,264,856,000	1,082,902,340	85.61%	181,953,660
002	Lulusan Pelatihan Prajabatan	1,092,897,000	984,518,990	90.08%	108,378,010
003	Lulusan Pelatihan Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Internal di Daerah	109,455,000	43,633,750	39.86%	65,821,250
019	Lulusan Pelatihan Orientasi Asrama Eksternal	43,500,000	40,089,600	92.16%	3,410,400
025	Peserta Knowledge Sharing	19,004,000	14,660,000	77.14%	4,344,000

Rincian realisasi anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Per Pelatihan
s.d. Triwulan IV Tahun 2020

No	Diklat	Anggaran			
		Rencana	Realisasi	% Capaian	Selisih
1	2	3	4	5=(4/3)X100%	6=3-4
1	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I	519,510,000	519,114,151	99.92%	395,849
2	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode II	405,590,000	397,624,339	98.04%	7,965,661
3	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode III	167,797,000	63,280,500	40.39%	100,016,500
4	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	2,404,000	2,361,875	98.25%	42,125
5	Pelatihan Teknis Orientasi untuk Pegawai DJP Angkatan I	21,750,000	20,044,800	92.16%	1,705,200
6	Lokakarya Pengelolaan Uang Persediaan bagi Bendahara di Lingkungan DJP*	-	-		
7	Pelatihan Teknis Penyuluh Perpajakan Angkatan I	15,955,000	13,386,875	83.90%	2,568,125
8	Pelatihan Teknis Orientasi untuk Pegawai DJP Angkatan II	21,750,000	20,044,800	92.16%	1,705,200
9	Lokakarya Optimalisasi Pemanfaatan Data Sektor Kehutanan	41,724,000	2,511,875	27.59%	30,212,125
10	Pelatihan Pengelolaan Kinerja	1,593,000	1,536,875	96.48%	56,125
11	Pelatihan Teknis Penyuluh Perpajakan Angkatan II	15,955,000	4,261,875	42.77%	9,130,625
12	Lokakarya Penanganan Perkara DJP-DJBC	31,824,000	8,011,875	25.18%	23,812,125
Total		1,245,852,000	1,068,242,340	85.74%	108,378,010

*DIPA Pusdiklat Pajak

Diagram 3.2
Penyerapan Anggaran Pelatihan
s.d. Triwulan IV Tahun 2020

*menggunakan DIPA Pusdiklat Pajak

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa ada realisasi anggaran pada pelatihan-pelatihan yang telah dibatalkan per akhir Triwulan IV tahun 2020. Hal ini dikarenakan pembatalan pelatihan-pelatihan tersebut baru dikonfirmasi setelah Bagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal BDK Manado melakukan pengadaan ATK yang diperlukan untuk pelatihan tersebut. Tentu pengadaan tersebut mengakibatkan adanya realisasi pada anggaran pelatihan tersebut meskipun pelatihan telah dibatalkan.

b. Dokumen Manajemen Pengetahuan

Anggaran BDK Manado untuk Output Dokumen Manajemen Pengetahuan berjumlah Rp 28,700,000. Sampai dengan akhir Triwulan IV, realisasi anggarannya adalah Rp 11,580,000 atau sebesar 40.35% dari total anggaran.

c. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Alokasi anggaran untuk Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal berjumlah Rp 1,892,553,000 untuk pengadaan perangkat fasilitas perkantoran dan renovasi gedung. Pada Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 1,878,225,965 atau 99.24% yaitu pengadaan Water Heater di asrama, *wireless microphone* dan renovasi gedung/bangunan.

d. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Anggaran BDK Manado untuk Output Layanan Dukungan Manajemen Satker berjumlah Rp 98,990,000. Hingga akhir Triwulan IV, anggaran yang terealisasi adalah sebesar 50.38% atau sebesar Rp 49,873,355. Rincian realisasi anggaran per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran per Komponen
Output Layanan Dukungan Manajemen Satker
s.d. Triwulan IV Tahun 2020

Kode	Output/Komponen	Anggaran			
		Rencana	Realisasi	% Capaian	Saldo
1	2	3	4	5=(4/3)X100%	6=3-4
1731.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	98,990,000	49,873,355	50.38%	49,116,645
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	200,000	-	0.00%	200,000
	Dialog Kinerja	200,000	-	0.00%	200,000
053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	540,000	-	0.00%	540,000
	Laporan Keuangan Satker	540,000	-	0.00%	540,000
054	Pengelolaan Kepegawaian	42,990,000	27,998,205	65.13%	42,990,000
	Capacity Building	42,990,000	27,998,205	65.13%	42,990,000
055	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	55,260,000	21,875,150	39.59%	43,384,850
	Pelayanan Protokoler dan Tamu	4,200,000	3,005,300	23.85%	1,194,700
	Pelaksanaan Jam Krida	3,800,000	1,118,500	46.60%	2,681,500
	Penyediaan Perlengkapan Kelas dan Asrama	36,500,000	14,502,350	39.73%	21,997,650
	Pelayanan Laundry	1,500,000	489,000	48.90%	1,011,000
	Administrasi Pembelajaran Lainnya	9,260,000	2,760,000	100.00%	6,500,000

e. Layanan Perkantoran

Anggaran BDK Manado untuk Output Layanan Perkantoran berjumlah Rp. 3,198,976,000. Hingga akhir Triwulan IV, anggaran yang telah terealisasi adalah sebesar Rp 1,242,792,084 atau sebesar 38.85% dengan sisa anggaran Rp. 1,956,183,916. Rincian realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran per Komponen
Output Layanan Perkantoran
s.d. Triwulan IV Tahun 2020

Kode	Output/Komponen Output	Anggaran			
		Rencana	Realisasi	% Capaian	Saldo
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100\%$	$6=3-4$
1731.994	Layanan Perkantoran	2,948,976,000	2,846,984,836	96.54%	101,991,164
001	Gaji dan Tunjangan	1,202,251,000	1,195,231,659	99.42%	7,019,341
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,746,725,000	1,651,753,177	94.56%	94,971,823

B. PELAKSANAAN DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN

Rencana dan realisasi capaian keluaran (output) sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Keluaran Kegiatan
s.d. Triwulan IV Tahun 2020

Kode	Kegiatan/Output	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Satuan	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=(3/4) \times 100\%$
1731	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara				
1731.502	Lulusan Pembelajaran di Daerah	617	3301	Peserta	535.01%
1731.632	Dokumen Manajemen Pengetahuan	8	10	Dokumen	125%
1731.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	Layanan	100%
1731.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	Layanan	100%
1731.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	100%

Berikut ini akan disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian serta permasalahan yang dihadapi dari komponen output masing-masing output yang telah dilaksanakan oleh Balai Diklat Keuangan Manado sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020.

a. Lulusan Pembelajaran di Daerah

Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2020, Balai Diklat Keuangan Manado telah mengadakan 7 pelatihan yang telah berakhir dari rencana 7 pelatihan. Realisasi peserta diperoleh melalui *open class* dengan jumlah 2985 peserta. Secara keseluruhan output Lulusan Pembelajaran di Daerah telah terealisasi sebesar 535.01%. Data rencana dan realisasi per suboutput dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi per Komponen
Output Lulusan Pembelajaran di Daerah
s.d. Triwulan IV Tahun 2020

No	Output	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Satuan	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=(3/4) \times 100\%$
1731.502	Lulusan Pembelajaran di Daerah	617	3301	Peserta	535.01 %
002	Pelatihan Prajabatan	180	194	Peserta	107.78%
003	Pelatihan Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Internal di Daerah	199	122	Peserta	61.30%
019	Pelatihan Orientasi Asrama Eksternal	116	0	Peserta	0%
025	Peserta <i>Knowledge Sharing</i>	150	2985	Frekuensi	1990.90%

Awal tahun, rencana peserta pelatihan adalah 617 peserta dengan komposisi sesuai kolom rencana pada tabel 3.7. Namun dikarenakan pandemi yang sampai saat ini belum berakhir, banyak pelatihan yang dibatalkan sehingga capaian output lulusan pembelajaran di daerah didominasi pada kegiatan *open class* atau output peserta *knowledge sharing*. Terkait dengan jumlah lulusan per diklat, selama Triwulan IV realisasi jumlah lulusan per diklat disajikan di dalam tabel 3.8.

Tabel 3.8
Jumlah Lulusan per Diklat
s.d. Triwulan IV Tahun 2020

Diklat		Peserta		% Capaian
		Rencana	Realisasi	
1		2	3	$4=(3/2) \times 100\%$
1	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I	62	62	100%
2	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode II	62	62	100%
3	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode III	62	70	112.9%

Diklat		Peserta		% Capaian
		Rencana	Realisasi	
1		2	3	$4=(3/2) \times 100\%$
4	Pelatihan Teknis Penyuluh Perpajakan Angkatan I	30	30	100%
5	Lokakarya Optimalisasi Pemanfaatan Data Sektor Kehutanan	30	28	93.33%
6	Pelatihan Teknis Penyuluh Perpajakan Angkatan II	30	29	96.67%
7	Lokakarya Penanganan Perkara DJP-DJBC	30	35	116.67%
Jumlah		306	316	103.26%

b. Dokumen Manajemen Pengetahuan

Sampai dengan akhir Triwulan IV, telah terealisasi 10 kegiatan dokumentasi pengetahuan (*knowledge capture*) dari target 8 output kegiatan atau sebesar 100%. Realisasi diperoleh melalui jumlah *knowledge capture* yang telah diupload di Kemenkeu *Learning Center*.

c. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal hanya terdiri atas 3 komponen, yaitu Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, rincinya adalah pengadaan 2 unit printer untuk peserta pelatihan, Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, rincinya untuk pengadaan *water heater* sebanyak 30 unit, 10 unit dispenser untuk *cluster* asrama, podium di mini aula, 3 unit *wireless microphone*, 4 unit *backdrop lcd projector* permanen, dan terakhir pembangunan atau renovasi gedung dan bangunan. Pada Triwulan IV, komponen Layanan Sarana dan Prasarana Internal telah terealisasi sebesar 100%. Lebih rincinya, realisasi berupa subkomponen Fasilitas Kantor yaitu 30 unit *water heater*, 3 unit *wireless microphone*, dan pembangunan atau renovasi gedung dan bangunan.

d. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Output Layanan Dukungan Manajemen Satker terdiri dari 4 komponen, yaitu Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, Pengelolaan Kepegawaian, serta Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan. Rincian target dan realisasi komponen dan subkomponen output ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Rencana dan Realisasi per Komponen dan Subkomponen
Output Layanan Dukungan Manajemen Satker
Triwulan IV Tahun 2020

Kode	Output/Komponen Output	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Satuan	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(4/3)X100%
1731.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	Layanan	100,00%
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	1	1	Laporan	100,00%
053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	1	1	Laporan	100,00%
054	Pengelolaan Kepegawaian	1	1	Laporan	100,00%
055	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	1	Laporan	100,00%

e. Layanan Perkantoran

Output Layanan Perkantoran terdiri dari 2 komponen, yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Rincian rencana dan realisasi Output Layanan Perkantoran sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Rencana dan Realisasi per Komponen
Output Layanan Perkantoran
s.d. Triwulan IV Tahun 2020

Kode	Output	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Satuan	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(3/4)X100%
1731.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	100%
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	12	bulan	100%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	12	bulan	100%

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Rekapitulasi Capaian IKU BDK Manado Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2020

Berkaitan dengan target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Diklat Keuangan Manado Periode Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2020, dapat disampaikan sebagaimana tabel 3.11 berikut ini :

Tabel 3.11
Target dan Capaian IKU BDK Manado
s.d. Triwulan IV Tahun 2020

No	Kode IKU	Uraian IKU	Target Tahun 2020	s.d. Triwulan IV		Keterangan
				Target	Realisasi	
1.	1a-CP	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%	93%	100%	Sampai dengan 31 Desember 2020, seluruh pelatihan telah dilaksanakan dengan total peserta lulus minimal baik berjumlah 191 peserta dari 191 peserta yang diujikan.
2.	1b-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4 (skala 5)	4	4.41	Iku ini diukur secara periode tahunan
3.	2a-N	Indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran	4,33 (skala 5)	4.33	4.66	Pelatihan yang telah dihitung indeks persepsi peserta pelatihan nya dengan realisasi 4.66 dari target 4.33
4.	3a-N	Persentase penyelesaian rekomendasi pelatihan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Rekomendasi pelatihan yang telah ditindaklanjuti per 31 Desember 2020 mencapai 100%
5.	4a-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4 (skala 5)	4	5	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran mencapai 5 dari target 4.
6.	5a-CP	Persentase efisiensi belanja birokrasi	10%	10%	47.49%	Capaian IKU Persentase Efisiensi Belanja Birokrasi satker Balai Diklat Keuangan Manado sebesar 120% (capaian pada Kertas Kerja Perhitungan IKU sebesar 474,90%, namun dibatasi maksimal capaian sebesar 120%), capaian output dan IKK sebagaimana disebutkan pada poin A di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia berdampak pada terjadinya perubahan mekanisme pelaksanaan dan pembatalan beberapa kegiatan, serta perubahan struktur anggaran dari rencana awal. Namun, atas komitmen organisasi yang kuat, target IKU ini dapat tercapai.
7.	5b-CP	Indeks persepsi integritas	90,10 (skala 100)	90.10	87.72	Per tahun 2020, Kemenkeu melakukan penyempurnaan metodologi (Survei Penilaian Integritas) SPI dan menggunakan perangkat survei (Kuesioner) yang sama dengan KPK dengan hasil Indeks 88.96. Untuk BPPK sendiri mendapatkan indeks sebesar 87.72.
8.	5c-N	Indeks efektivitas forum group discussion kebijakan Kementerian Keuangan	80 (skala 100)	80	93.2	Sesuai Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-379.2/SJ/2020 FGD triwulan I tidak perlu dilaksanakan dan tidak dihitung capaian IKU nya. Untuk FGD triwulan II telah dilaksanakan pada awal bulan Juni 2020. Nilai efektivitas sebesar 92 dari target 80. Untuk Triwulan III FGD dilaksanakan di bulan September dan Triwulan IV dilaksanakan pada bulan November.
9.	5d-N	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai	79%	79%	107%	Iku ini diukur secara tahunan
10.	5e-N	Persentase implementasi inovasi	100%	100%	100%	TOR Inovasi bdk manado telah dikirimkan ke Sekretariat BPPK melalui Nota Dinas Kepala BDK Nomor ND-91/BPP.11/2020 tanggal 30 Maret 2020. TOR Inovasi sudah disetujui Setban melalui Nota Dinas nomor ND-1693/PP.1/2020 tanggal 30 Juni 2020. Laporan Pelaksanaan Inovasi telah dikirim ke Sekretariat BPPK melalui Nota Dinas Kepala BDK Nomor ND-384/BPP.11/2020.
11.	6a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	98.93%	Dari target 95% realisasi 98.93%
12.	6b-N	Rasio utilisasi BMN	100%	100%	103.64%	Iku ini diukur secara tahunan
13	7a-N	Persentase pemenuhan basis data aplikasi Semantik	100%	100.00%	108.1%	Hingga akhir September 2020 terdapat 7 pelatihan yang sudah diinput dalam aplikasi Semantik.

Penjelasan atas Capaian IKU

1. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik

Sasaran Strategis						
<p>Tata kelola dan Sumber Daya Kementerian yang optimal</p> <p>Tata kelola kementerian yang optimal adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparan, partisipatif dan akuntabel) sehingga mampu meningkatkan kepuasan pengguna layanan.</p> <p>Sumber daya kementerian yang optimal adalah SDM yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien sesuai target yang ditetapkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.</p>						
Indikator Kinerja Utama						
<p>Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik</p> <p>Lulusan berpredikat minimal baik adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">- lulusan pelatihan teknis dari Kementerian Keuangan yang memperoleh nilai minimal 76 pada evaluasi pertama- lulusan pelatihan dasar yang memperoleh nilai minimal 76 pada evaluasi pertama (bukan peserta mengulang) <p>Pembagi dalam IKU ini adalah jumlah peserta pelatihan dari Kementerian Keuangan yang mengikuti ujian.</p> <p>Lulusan dari pelatihan yang tidak mensyaratkan hasil ujian sebagai syarat kelulusan tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini.</p>						
Formula						
$\frac{\text{Jumlah lulusan dengan predikat minimal baik}}{\text{Jumlah peserta ujian}} \times 100\%$						
Capaian IKU						
	s.d. 31 Desember 2020			Y		
IKU	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.a-CP Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	93%	100%	107.53%	93%	100%	107.53%

Penjelasan atas Capaian IKU

Sampai dengan 31 Desember 2020, seluruh pelatihan telah dilaksanakan dengan total peserta lulus minimal baik berjumlah 191 peserta dari 191 peserta yang diujikan.

2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Sasaran Strategis

Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal

Tata kelola kementerian yang optimal adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparan, partisipatif dan akuntabel) sehingga mampu meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Sumber daya kementerian yang optimal adalah SDM yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien sesuai target yang ditetapkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

Indikator Kinerja Utama

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan BPPK terhadap pihak eksternal. Lingkup survei adalah pengguna eksternal atas pelayanan unggulan BPPK.

IKU ini diukur atas layanan unggulan yang diberikan oleh Pusdiklat, PKN STAN dan BDK yang diperoleh dari survei independen yang dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal.

Formula

Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2020			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.b-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4	4.41	110.25%	4	4.41	110.25%

Penjelasan atas Capaian IKU

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unggulan BPPK yang diperoleh dari survei independen yang dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal. Capaian belum ada dikarenakan IKU ini merupakan IKU tahunan.

3. Indeks Persepsi Peserta Terhadap Proses Pembelajaran

Sasaran Strategis

Proses pembelajaran yang kreatif dan efektif

Proses pembelajaran yang kreatif dan efektif adalah proses pembelajaran yang didesign dan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta pelatihan untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta diklat sehingga dapat memfasilitasi peserta pelatihan untuk menguasai kompetensi yang diharapkan.

Indikator Kinerja Utama

Indeks persepsi peserta terhadap penyelenggaraan pembelajaran

Indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran merupakan nilai yang menggambarkan apa yang dirasakan oleh peserta pelatihan mengenai pelayanan penyelenggaraan pembelajaran dan kualitas pengajar. Nilai ini diukur dengan skala 1-5. Alat survei dan metode penghitungan yang digunakan mengacu pada Peraturan Kepala BPPK nomor Per-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Aspek yang diukur pada IKU ini adalah aspek persepsi/kenyataan, dengan butir penilaian sebagai berikut:

1. kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan/kebutuhan peserta pembelajaran;
2. bahan ajar mudah dipahami;
3. kesesuaian metode pembelajaran dengan materi pembelajaran;
4. kesiapan penyelenggara pembelajaran dalam melayani peserta pembelajaran selama proses pembelajaran;
5. lingkungan belajar berfungsi dengan baik (meliputi ruang kelas dan asrama);
6. pengetahuan pengajar atas materi yang disampaikan;
7. kemampuan pengajar menyampaikan materi.

Dalam hal pelatihan diselenggarakan di luar fasilitas milik Balai, maka poin 3 dikecualikan dari penghitungan IKU.

Pelatihan yang diselenggarakan Balai dengan DIPA Pusdiklat termasuk dalam IKU ini.

Formula

Peraturan Kepala BPPK nomor Per-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan

No	Nama Pelatihan	Butir yang dievaluasi							Indeks persepsi (rata-rata butir 1 s.d. 7)
		1	2	3	4	5	6	7	
1									
2									
3									
dst									
Realisasi IKU									(rata-rata indeks persepsi seluruh pelatihan)

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2020			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.a-N Indeks Persepsi Peserta Pelatihan terhadap Proses Pembelajaran	4.33	4.66	107.52%	4.33	4.66	107.52%

Penjelasan atas Capaian IKU

Sampai pada Triwulan IV tahun 2020, pelatihan di BDK Manado telah dihitung indeks persepsi peserta pelatihannya dengan realisasi 4.66 dari target 4.33

4. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Pelatihan yang Ditindaklanjuti

Sasaran Strategis

Evaluasi Kinerja Konstruktif

Evaluasi kinerja konstruktif adalah evaluasi atas kinerja yang mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat membangun dan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan pelatihan selanjutnya.

Indikator Kinerja Utama

Persentase Penyelesaian Rekomendasi Pelatihan yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi pelatihan adalah rekomendasi yang didapatkan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh peserta pelatihan, baik yang didapatkan melalui evaluasi melalui kuesioner maupun evaluasi tatap muka.

Hasil evaluasi dari peserta pelatihan ini akan dibahas pada rapat yang dilakukan minimal setiap bulan sekali.

Rekomendasi dari peserta pelatihan ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat tindak lanjut (primer, sekunder dan tersier).

Tindak lanjut primer adalah jika ada keluhan maka akan ditindaklanjuti sesegera mungkin (on the spot). Tindak lanjut sekunder adalah jika ada keluhan maka akan ditindaklanjuti selama pelatihan berjalan. Sedangkan tindak lanjut tersier adalah tindak lanjut atas keluhan yang baru bisa dilaksanakan pada periode pelatihan berikutnya.

Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah:

1. Rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti segera (pada saat pelatihan sedang berlangsung);
2. Rekomendasi yang diterima oleh unit terkait dan disetujui dalam rapat evaluasi untuk ditindaklanjuti.

Formula

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang harus selesai ditindaklanjuti pada saat periode pelaporan}} \times 100\%$$

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2020			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3.a-N Persentase Penyelesaian Rekomendasi Pelatihan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan atas Capaian IKU

Rekomendasi pelatihan yang telah ditindaklanjuti per 31 Desember 2020 mencapai 100%

5. Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran

Sasaran Strategis

Pengendalian mutu pembelajaran yang efektif

Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan mutu dan kualitas suatu produk atau layanan pembelajaran yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan janji layanan, serta dilakukan secara profesional dan konsisten.

Indikator Kinerja Utama

Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran

Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pembelajaran dengan berdasar pada standar mutu pembelajaran yang berlaku di BPPK.

Dalam hal standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala BPPK nomor 97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan belum ditetapkan, maka pelaksanaan penjaminan mutu berpedomana pada peraturan atau keputusan terkait:

- a. analisis kebutuhan pembelajaran;
- b. desain pembelajaran;
- c. validasi program;
- d. penyelenggaraan pembelajaran;
- e. evaluasi pembelajaran; dan
- f. sarana dan prasarana pembelajaran.

Kriteria yang diuji dalam penjaminan kualitas pembelajaran meliputi kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, kualitas isi, akurasi waktu, dan keamanan informasi.

Ruang lingkup dan pembobotan penilaian penjaminan kualitas pembelajaran pada Pusdiklat dan Balai Diklat mengikuti Standar Mutu Pembelajaran terbaru

Formula

Indeks 5 = 90-100

Indeks 4 = 80-89,99

Indeks 3 = 70-70,99

Indeks 2 = 50-69,99

Indeks 1 = 0-49,99

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2020			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.a-CP Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran	4	5	125%	4	5	125%

Penjelasan atas Capaian IKU

Sesuai dengan kebijakan BPPK dalam rangka pandemi Covid-19, IKU ini diubah trajectorynya menjadi tahunan

6. Persentase Efisiensi Belanja Birokrasi

Sasaran Strategis

Organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu memwadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

Indikator Kinerja Utama

Persentase Efisiensi Belanja Birokrasi

Pelaksanaan *office automation* diharapkan dapat mengurangi belanja birokrasi. Efisiensi belanja birokrasi ditunjukkan oleh penurunan persentase realisasi belanja pada suatu triwulan dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Persentase realisasi belanja diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan pagu belanja yang ditetapkan di awal tahun.

Lingkup belanja yang diukur oleh IKU ini meliputi: (i) belanja bahan percetakan dan konsumsi; (ii) belanja perjalanan dinas dalam negeri kecuali dalam rangka pelantikan, mutasi, dan diklat, dan (iii) RDK dan konsinyering.

IKU ini diukur secara triwulan dan year-on-year (yoy) dimana data realisasi pada triwulan saat ini dan di tahun berjalan dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Apabila persentase realisasi pada tahun berjalan lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya, maka indeks capaian adalah 0.

Formula

Formula % efisiensi belanja:

$(\% \text{Realisasi belanja birokrasi tahun } y-1) - (\% \text{ Realisasi belanja birokrasi tahun } y)$

Contoh Penghitungan:

Periode	Pagu	Realisasi	%Realisasi
Q1 2020	1000	800	80%
Q1 2019	1000	900	90%

Maka, % efisiensi belanja:

$$= (90\% - 80\%) / 90\% = 11,11\%$$

Maka, indeks capaian IKU:

$$= 11,11\% / 10\% * 100 = 111,1$$

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2020			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.a-CP Persentase Efisiensi Belanja Birokrasi	10%	47,49%	120%	10%	47,49%	120%

Penjelasan atas Capaian IKU

Karena adanya kebijakan dari Setjen maka iku ini di ubah trajectorynya menjadi tahunan.

7. Indeks Persepsi Integritas

Sasaran Strategis

Organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Sekretariat Jenderal.

Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Berkinerja tinggi adalah SDM yang melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal

Indikator Kinerja Utama

Indeks Persepsi Integritas

Indeks persepsi integritas adalah hasil dari penilaian mandiri persepsi integritas yang telah ditetapkan dalam Perdirjen nomor 142/IJ/2018, yang dikembangkan dari Integrity Assessment yang telah dilaksanakan oleh KPK.

Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan (Inspektorat Jenderal dhi. Setijten dan IBI dan berkoordinasi dengan setiap UKI UE I serta disupervisi oleh KPK)

Pengukuran dilakukan atas hasil survei yang dilakukan kepada seluruh pejabat/pegawai dan sampling pengguna layanan pada seluruh unit sampel yang telah ditentukan, survei dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi selama tahun berjalan

Metodologi yang dilakukan untuk penilaian indeks persepsi integritas, baik internal

dan eksternal, melalui:

- a. Survei
- b. FGD
- c. Penilaian Lapangan (interview, observasi, dan reuiu dokumen)

Penilaian dilakukan melalui kuesioner survei online melalui aplikasi . Atas hasil survei yang diterima, dilakukan FGD untuk mengkonfirmasi hasil survei, dan penilaian lapangan berupa wawancara pengguna layanan secara langsung dan pengumpulan dokumen terkait integritas dan kualitas layanan pada unit sampel yang didatangi.

dari hasil FGD dan penilaian lapangan, dan didukung dokumen informasi terkait pelanggaran integritas dari IBI, dilakukan kalibrasi nilai hasil survei yang dilakukan oleh tim penilai dari Itjen, hasil kalibrasi ini yang menjadi nilai (indeks) persepsi integritas

Penilaian persepsi integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember

Formula

Capaian IKU = (50% x nilai internal) + (50% x nilai eksternal)

- capaian IKU untuk Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Bidang Investigasi menggunakan capaian Kementerian Keuangan
- capaian IKU untuk Inspektorat I s.d VII menggunakan rata-rata hasil penilaian atas unit eselon I klien pengawasannya.

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2020			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.b-N Indeks Persepsi Integritas	90.10%	87.72%	97.36%	90.10%	87.72%	97.36%

Penjelasan atas Capaian IKU

Per tahun 2020, Kemenkeu melakukan penyempurnaan metodologi (Survei Penilaian Integritas) SPI dan menggunakan perangkat survei (Kuesioner) yang sama dengan KPK dengan hasil Indeks 88.96. Untuk BPPK sendiri mendapatkan indeks sebesar 87.72.

8. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Kebijakan Kemenkeu

Sasaran Strategis

Organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Sekretariat Jenderal.

Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Berkinerja tinggi adalah SDM yang melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal

Indikator Kinerja Utama

Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Kebijakan Kemenkeu

Tingkat efektivitas FGD kode etik merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), understanding (pemahaman peserta terhadap materi FGD), learning enthusiasm (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), contribution to learning (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai).

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain terkait kode etik, akan terdapat tema lain dalam pelaksanaan FGD. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Formula

No	Nilai/Angka	Interpretasi
1	$90 \leq x \leq 100$	Sangat Efektif
2	$80 \leq x \leq 89$	Efektif
3	$70 \leq x \leq 79$	Cukup Efektif
4	$60 \leq x \leq 69$	Kurang efektif
5	< 60	Tidak Efektif
Formula IKU:	Rata-rata indeks efektivitas pelaksanaan FGD	

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2020			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Kebijakan Kemenkeu	80	93.2	116.5%	80	93/2	116.5%

Penjelasan atas Capaian IKU

Sesuai Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-379.2/SJ/2020 FGD triwulan I tidak perlu dilaksanakan dan tidak dihitung capaian IKU nya. Untuk FGD triwulan II telah dilaksanakan pada awal bulan Juni 2020. Nilai efektivitas sebesar 92 dari target 80. Untuk Triwulan III, FGD dilaksanakan di bulan September dan FGD Triwulan IV dilaksanakan pada bulan November.

9. Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Sasaran Strategis

Organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu memwadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Sekretariat Jenderal.

Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Berkinerja tinggi adalah SDM yang melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal

Indikator Kinerja Utama

Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai terdiri dari kegiatan penugasan pelatihan sesuai dengan AKP dan pemenuhan standar jamlat pengembangan kompetensi pegawai.

(a) Penugasan pelatihan sesuai dengan AKP

Pelatihan adalah peningkatan keterampilan, serta pembentukan sikap dan perilaku dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan berbagai metode dan sumber untuk mendukung pencapaian target organisasi.

-Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) adalah serangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program-program pembelajaran guna mendukung

pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

- Rencana Penugasan pelatihan sesuai AKP mengacu pada rencana penugasan pelatihan pegawai BPPK tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Nota Dinas Sekretaris Badan Nomor ND-3477/PP.1/2020 tanggal 31 Desember 2019 hal Rencana Penugasan Pelatihan Tahun Anggaran 2020.

- Realisasi penugasan pegawai yang mengikuti pelatihan sesuai AKP dihitung berdasarkan jumlah penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP Jabatan dan AKP Individu.

- AKP Jabatan adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan kompetensi pemangku jabatan pada unit pengguna.

- AKP Individu adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung kompetensi individu.

Termasuk dalam realisasi penugasan pelatihan yang mengalami:

1. Perubahan jadwal pelatihan; dan/atau

2. Penggantian pegawai yang ditugaskan

Dikeluarkan dari penghitungan adalah AKP yang tidak dapat dipenuhi karena program pelatihan batal diselenggarakan oleh BPPK pada tahun berjalan.

b) Persentase Pegawai yang telah memenuhi standar Pengembangan Kompetensi Pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP).

1 jamlat adalah 45 menit

Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2020;

- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;

- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 31 Desember 2020;

- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2020 tidak diperhitungkan di unit barunya

Formula

$$a = \frac{\text{Jumlah realisasi penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP reguler 2020}}{\text{Jumlah rencana penugasan pelatihan kompetensi hasil AKP reguler 2020}} \times 100\%$$

$$b = \frac{\text{Jumlah bawahan telah memenuhi Kriteria}}{\text{Jumlah Bawahan (sesuai lingkup IKU)}} \times 100\% + \frac{\text{Jumlah bawahan telah melebihi Kriteria}}{\text{Jumlah Bawahan (sesuai lingkup IKU)}} \times 20\%$$

$$\text{Realisasi} = 65\% \times a + 35\% \times b$$

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2020			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.d-N Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	79%	107%	120%	79%	107%	120%

Penjelasan atas Capaian IKU

IKU ini diukur secara tahunan dan realisasi tercapai hingga 107% dari target 97%.

10. Persentase Implementasi Inovasi

Sasaran Strategis

Organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewartakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Sekretariat Jenderal.

Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Berkinerja tinggi adalah SDM yang melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal

Indikator Kinerja Utama

Persentase Implementasi Inovasi

Implementasi inovasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu penyusunan TOR inovasi dan implementasi inovasi.

TOR Inovasi disampaikan kepada Sekretaris Badan dan sekurang-kurangnya berisi penjelasan tentang:

1. Apa permasalahan yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi layanan;
2. Bagaimana inovasi layanan dimaksud dapat memecahkan masalah tersebut;
3. Dalam hal apa inovasi layanan dimaksud bersifat kreatif dan inovatif;
4. Kapan implementasi inovasi direncanakan untuk diimplementasikan dan siapa saja pihak yang terlibat;
5. Sumber daya apa saja yang akan digunakan untuk melaksanakan inovasi layanan dimaksud.

Implementasi inovasi dibuktikan dengan laporan yang sekurangnya berisi tentang:

1. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi dan solusi yang diambil;
2. Manfaat dan output implementasi inovasi layanan;
3. Apakah inovasi layanan ini berkelanjutan dan dapat direplikasi.

Formula

Tahapan	Nilai
Penyusunan TOR	30%
Persetujuan Sekretaris Badan	20%
Implementasi	50%
Total	100%

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2020			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.e-N Persentase Implementasi Inovasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan atas Capaian IKU

TOR Inovasi bdk manado telah dikirimkan ke Sekretariat BPPK melalui Nota Dinas Kepala BDK Nomor ND-91/BPP.11/2020 tanggal 30 Maret 2020. TOR Inovasi sudah disetujui Setban melalui Nota Dinas nomor ND-1693/PP.1/2020 tanggal 30 Juni 2020. Laporan Pelaksanaan Inovasi telah dikirim ke Sekretariat BPPK melalui Nota Dinas Kepala BDK Nomor ND-384/BPP.11/2020.

11. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sasaran Strategis

Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran

selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Indikator Kinerja Utama

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU reformulasi yang bertujuan mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran K/L dalam aspek kualitas dan aspek administratif

Capaian dihitung dari dua komponen, yaitu:

1. Nilai kinerja anggaran (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART))

Nilai capaian diperoleh berdasarkan:

- a. Nilai aspek implementasi (penyerapan anggaran, capaian output, efisiensi, dan konsistensi); dan
- b. Nilai aspek manfaat (pencapaian Sasaran Strategis level K/L dan Sasaran Program level eselon I K/L).

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai capaian diperoleh dari 12 indikator, yaitu: Frekuensi Revisi DIPA, Deviasi Hal. III DIPA, Retur SP2D, Realisasi Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Penerbitan SPM secara benar, Deviasi Renkas, Pagu Minus Belanja Pegawai, Dispensasi SPM, Ketepatan Waktu Data Kontrak, Pertanggungjawaban UP, dan Penyampaian LPJ.

Formula

$$KPA = (40\% \times \text{Nilai SMART}) + (60\% \times \text{Nilai IKPA})$$

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2020			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	98.83%	104.14%	95%	98.83%	104.14%

Penjelasan atas Capaian IKU		
Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian s.d. 31 Desember 2020
A.	Nilai IKPA	97.75%
	1 Pengelolaan UP	9.41%
	2 Data Kontrak	17.65%
	3 Kesalahan SPM	5.88%
	4 Retur SP2D	5.88%
	5 Hal III DIPA	
	6 Revisi DIPA	
	7 Penyelesaian Tagihan	14.12%
	8 Konfirmasi Capaian Output	11.76%
	9 Rekon LPJ	5.88%
	10 Renkas	
	11 Realisasi	15.40%
	12 Pagu Minus	5.88%
	13 Dispensasi SPM	5.88%
B.	Nilai SMART	
	Nilai Capaian IKU PKPA s.d. 31 Desember 2020	97.75%

12. Rasio Utilisasi Barang Milik Negara

Sasaran Strategis
<p>Layanan Sarana Prasarana yang Optimal</p> <p>Layanan Sarana Prasarana yang Optimal merupakan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta yang termamfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan</p>
Indikator Kinerja Utama
<p>Rasio Utilisasi Barang Milik Negara</p> <p>Utilisasi BMN merupakan pendayagunaan dan pemanfaatan BMN untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung K/L, baik yang berorientasi profit/komersil maupun tidak. Cakupan utilisasi BMN meliputi penetapan status penggunaan BMN dan pemanfaatan BMN.</p> <p>Rasio Utilisasi BMN BPPK merupakan rasio nilai BMN yang diutilisasi yang diperoleh dari nilai BMN di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang ditetapkan utilisasinya dibandingkan dengan nilai Total BMN yang dikuasai BPPK.</p> <p>Utilisasi BMN BPPK yang dapat ditetapkan utilisasinya yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMN yang diutilisasi melalui pemanfaatan BMN (berupa disewakan, di-pinjamkai-kan) 2. Utilisasi BMN melalui Penetapan Status Penggunaan (berupa dipergunakan sendiri)

atau utilisasi penggunaan oleh pihak lain)

Formula

$$\frac{\text{Nilai BMN yang ditetapkan } \textit{utilisasinya}}{\text{Total Nilai BMN BPPK per 30 Juni 2019}} \times 100\%$$

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2020			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.b-N Rasio Utilisasi Barang Milik Negara	100%	103.64%	103.64%	100.00%	103.64%	103.64%

Penjelasan atas Capaian IKU

IKU Rasio Utilisasi Barang Milik Negara diukur setiap tahun.

13. Rasio Utilisasi Barang Milik Negara

Sasaran Strategis

Sistem Manajemen Informasi yang Andal

Sistem manajemen informasi yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau Business Impact Analysis (BIA).

Indikator Kinerja Utama

Persentase Pemenuhan Basis Data Aplikasi Semantik

IKU ini mengukur ketepatan waktu BDK dalam menginput kelengkapan data terkait penyelenggaraan pelatihan.

Kegiatan yang menjadi tolak ukur kelengkapan data adalah:

1. Input nama pengajar;
2. Input rekapitulasi kehadiran peserta;
3. Pengiriman data kelulusan peserta.

Penyelenggaraan seminar dan diklat prajabatan dikecualikan dari penghitungan IKU in

Formula

Kegiatan	Waktu	Nilai
Input nama pengajar	s.d. H-1 pelatihan dibuka	110%
	s.d pelatihan ditutup	100%
	Setelah penutupan	20%
Input rekap kehadiran	saat pelatihan ditutup:110%	110%
	H+1 hari kerja setelah penutupan: 100%	100%
	H+2 hari kerja setelah penutupan: 90%	90%
	H+3 hari kerja setelah penutupan: 80%	80%
	H+4 hari kerja setelah penutupan: 70%	70%
	H+5 hari kerja penutupan: 50%	50%
Pengiriman data kelulusan peserta (non kelulusan)	>H+5 hari kerja setelah penutupan : 20%	20%
	< 15 hari kalender setelah pelatihan ditutup	110%
	15 hari kalender setelah pelatihan ditutup	100%
	H+16 hari kalender setelah pelatihan ditutup	90%
	H+17 hari kalender setelah pelatihan ditutup	80%
	H+18 hari kalender setelah pelatihan ditutup	70%
	H+19 hari kalender setelah pelatihan ditutup	50%
>H+19 hari kalender setelah pelatihan ditutup	20%	
Pengiriman data kelulusan peserta (pelatihan dengan kelulusan)	< 30 hari kalender setelah pelatihan ditutup	110%
	30 hari kalender setelah pelatihan ditutup	100%
	H+31 hari kalender setelah pelatihan ditutup	90%
	H+32 hari kalender setelah pelatihan ditutup	80%
	H+33 hari kalender setelah pelatihan ditutup	70%
	H+34 hari kalender setelah pelatihan ditutup	50%
	>H+34 hari kalender setelah pelatihan ditutup	20%

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2020			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7.a-N Persentase Pemenuhan Basis Data Aplikasi Semantik	100%	108.1%	108%	100%	108.1%	108%

Penjelasan atas Capaian IKU

Hingga akhir Tahun 2020 terdapat 7 pelatihan yang sudah diinput dalam aplikasi Semantik.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan BDK Manado sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anggaran yang diterima Balai Diklat Keuangan Manado di awal tahun berdasarkan DIPA nomor DIPA-015.11.2.636799/2020 tanggal 12 November 2019 adalah sebesar Rp 7,558,682,000. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah dengan output yang terdiri dari Lulusan Pembelajaran di Daerah, Dokumen Manajemen Pengetahuan, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Dukungan Manajemen Satker dan Layanan Perkantoran. Dalam perkembangannya terjadi beberapa kali revisi anggaran, di mana pada revisi terakhir pada tanggal 29 November 2020, anggaran Balai Diklat Keuangan Manado menjadi Rp 6,234,075,000. Rincian serapan anggaran per output adalah:
 - a. Anggaran BDK Manado untuk Output Lulusan Pembelajaran di Daerah berjumlah Rp 1,264,856,000. Sampai dengan akhir Triwulan IV, realisasi anggaran adalah Rp 1,063,639,840 atau capaian 85,61%. Anggaran pada output layanan pembelajaran di daerah tersebut direncanakan untuk membiayai 12 pelatihan namun 5 pelatihan diantaranya dibatalkan (salah satu diantaranya menggunakan DIPA Pusdiklat Pajak), seminar yang terdiri dari 5 open class, dan administrasi pembelajaran lainnya. Anggaran untuk suboutput Lulusan Pelatihan Orientasi Asrama Eksternal telah memiliki realisasi namun tidak ada output lulusan pelatihan dikarenakan realisasi tersebut dilakukan atas pengadaan ATK peserta pelatihan sebelum pengumuman pembatalan pelatihan diterima oleh BDK Manado.
 - b. Anggaran yang telah terserap untuk Output Dokumen Manajemen Pengetahuan adalah sebesar Rp 11,580,000 dari total anggaran sebesar Rp 28,700,000 atau realisasi sebesar 40.35%.
 - c. Alokasi anggaran untuk Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal berjumlah Rp 1,892,553,000. Pada Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 1,878,225,965 atau 99.24%.

- d. Anggaran BDK Manado untuk Output Layanan Dukungan Manajemen Satker berjumlah Rp 98,990,000. Hingga akhir Triwulan IV, anggaran yang terealisasi adalah sebesar 50.38% atau sebesar Rp 49,873,355.
 - e. Anggaran BDK Manado untuk Output Layanan Perkantoran berjumlah Rp 2,948,976,000. Hingga akhir Triwulan IV, anggaran yang telah terealisasi adalah sebesar Rp 2,846,984,836 atau sebesar 96.54%.
2. Hingga 31 Desember 2020 dari total 13 Indikator Kinerja Utama (IKU), 12 IKU memenuhi target per Triwulan IV/Tahunan (Hijau) dan 1 IKU tidak mencapai realisasi target (Kuning).
 3. Sampai dengan akhir Triwulan IV, Balai Diklat Keuangan Manado memiliki 7 pelatihan yang telah berakhir dari total rencana 7 pelatihan.
 4. Telah terealisasi 3301 peserta dari total rencana 617 peserta.

B. SARAN

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2020 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai fungsi tugas BDK Manado, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Untuk menjaga kinerja Balai Diklat Keuangan Manado yang sudah cukup baik dan untuk meningkatkan kinerja BDK Manado maka diperlukan :

1. Setiap pegawai melakukan pekerjaan sesuai tugas serta fungsinya masing-masing dan berkoordinasi satu dengan yang lain meskipun bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) dan tetap mempertahankan protokol kesehatan selama pandemi masih berlangsung.
2. Melakukan evaluasi atas capaian IKU yang belum tercapai di Tahun 2020 sebagai dasar pembelajaran bagi BDK Manado dalam mengejar capaian IKU di Tahun 2021.
3. Tetap rutin melaksanakan *monitoring* IKU yang secara berkala melalui DKO Triwulanan supaya capaian kinerja BDK Manado dapat tercapai di akhir tahun 2021.
4. Untuk mendukung pelatihan/*open class* jarak jauh yang akan dilakukan, perlu adanya dukungan teknis yang mendukung baik secara *software* maupun *hardware*.
5. Melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang berjalan;

LAMPIRAN I
KONTRAK KINERJA BDK MANADO
TAHUN 2020

KONTRAK KINERJA
NOMOR: 19/PP/2020
KEPALA BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tata kelola dan sumber daya Kementerian yang optimal	1a-CP	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik 93%
		1b-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan 4 (skala 5)
2.	Proses pembelajaran yang efektif	2a-N	Indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran 4,33 (skala 5)
3.	Evaluasi kinerja konstruktif	3a-N	Persentase penyelesaian rekomendasi pelatihan yang ditindaklanjuti 100%
4.	Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif	4a-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran 4 (skala 5)
5.	Organisasi dan SDM yang optimal	5a-CP	Persentase efisiensi belanja birokrasi 10%
		5b-CP	Indeks persepsi integritas 90,10 (skala 100)
		5c-N	Indeks efektivitas <i>forum group discussion</i> kebijakan Kementerian Keuangan 80 (skala 100)
		5d-N	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai 79%
		5e-N	Persentase implementasi inovasi 100%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	6a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95%
		6b-N	Rasio utilisasi BMN 100%
7.	Sistem manajemen informasi yang andal	7a-N	Persentase pemenuhan basis data aplikasi Semantik 100%

Kegiatan
 Pengembangan Kompetensi SDM Keuangan Negara di Daerah -
 BDK Manado

Anggaran
 Rp 7.558.682.000,00

Manado, 31 Januari 2020

Kepala Badan Pendidikan dan
 Pelatihan Keuangan,

Plt. Kepala Balai Diklat Keuangan Manado,

Rionald Silaban
 NIP 19660423 199010 1 001

Rahmad Gendro Legowo
 NIP 19850512 200901 1 003

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	Tata kelola dan sumber daya Kementerian yang optimal							
1a-CP	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
1b-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	-	4	4 (skala 5)
2.	Proses pembelajaran yang efektif							
2a-N	Indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33 (skala 5)
3.	Evaluasi kinerja konstruktif							
3a-N	Persentase penyelesaian rekomendasi pelatihan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif							
4a-CP	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	-	4	4	-	4	4	4 (skala 5)
5.	Organisasi dan SDM yang optimal							
5a-CP	Persentase efisiensi belanja birokrasi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
5b-CP	Indeks persepsi integritas	-	-	-	-	-	90,10	90,10 (skala 100)
5c-N	Indeks efektivitas <i>forum group discussion</i> kebijakan Kementerian Keuangan	80	80	80	80	80	80	80 (skala 100)
5d-N	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	-	-	79%	79%

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5e-N	Persentase implementasi inovasi	30%	50%	50%	-	50%	100%	100%
6.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
6a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
6b-N	Rasio utilisasi BMN	-	-	-	-	-	100%	100%
7.	Sistem manajemen informasi yang andal							
7a-N	Persentase pemenuhan basis data aplikasi Semantik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pekanbaru, 31 Januari 2020

PNS yang dinilai,

Rahmad Gendro Legowo
NIP 19850512 200901 1 003

**INISIATIF STRATEGIS
BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	Tindaklanjut <i>competitive advantage</i> di wilayah kerja Balai	Kajian mengenai <i>competitive advantage</i> di wilayah kerja Balai	Q1 : Perencanaan	Q1 : Rencana Tindaklanjut	Juni s.d. November	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal • Seksi Penyelenggaraan • Seksi Evaluasi dan Informasi Balai Diklat Keuangan Manado	
				Q2 : Persiapan	Q2 : Rapat Koordinasi			
				Q3 : Pelaksanaan	Q3 : Laporan Pelaksanaan			
				Q4 : Evaluasi	Q4 : Laporan Hasil Evaluasi			
2.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	Implementasi Kemenkeu Corpu	a. 8 video pengetahuan yang diupload di KLC b. Dokumentasi hasil pelaksanaan <i>open class</i>	Q1 : <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan KAKC • Pelaksanaan <i>open class</i> 1-3 	Q1 : <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka Acuan <i>Knowledge Capture</i> • Laporan <i>open class</i> 1-3 	Januari-Desember	a. Tim <i>Knowledge Management</i> b. Seksi Penyelenggaraan Balai Diklat Keuangan Manado	
				Q2 : <ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan gambar • Pelaksanaan <i>open class</i> 4 	Q2 : <ul style="list-style-type: none"> • Gambar, video • Laporan <i>open class</i> 4 			
				Q3 : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Editing</i> • Pelaksanaan <i>open class</i> 5 	Q3 : <ul style="list-style-type: none"> • Video • Laporan <i>open class</i> 5 			

				Q4 : <ul style="list-style-type: none">• <i>Editing</i>• Pelaksanaan <i>open class 6</i>	Q4 : <ul style="list-style-type: none">• Video• Laporan <i>open class 6</i>			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Manado, 31 Januari 2020

PNS yang dinilai,

Rahmad Gendro Legowo 9
NIP 19850512 200901 1 003

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Rionald Silaban	1	Nama	Rahmad Gendro Legowo
2	NIP	19660423 199010 1 001	2	NIP	19850512 200901 1 003
3	Pangkat/ Gol. Ruang	IV/e/Pembina Utama	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Penata / III/c
4	Jabatan	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	4	Jabatan	Plt. Kepala Balai Diklat Keuangan Manado
5	Unit Kerja	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	5	Unit Kerja	Balai Diklat Keuangan Manado

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1.	Menghasilkan lulusan pendidikan dan pelatihan dari Kemenkeu dengan predikat minimal baik		93%	100	12	-
2.	Meningkatkan kepuasan pengguna layanan		4 (skala 5)	100	12	-
3.	Mendapatkan indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran		4,33 (skala 5)	100	12	-
4.	Menyelesaikan rekomendasi pelatihan yang ditindaklanjuti		100%	100	12	-
5.	Memenuhi Standar kualitas pembelajaran		4 (skala 5)	100	12	-
6.	Mewujudkan belanja birokrasi yang efisien		10%	100	12	-
7.	Mewujudkan organisasi yang berintegritas tinggi		90,10 (skala 100)	100	12	-
8.	Melaksanakan <i>forum group discussion</i> kebijakan Kementerian Keuangan yang efektif		80 (skala 100)	100	12	-
9.	Memenuhi pengembangan kompetensi pegawai		79%	100	12	-
10.	Mengimplementasikan inovasi		100%	100	12	-
11.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran		95%	100	12	6,106 M
12.	Mencapai rasio utilisasi BMN		100%	100	12	-
13.	Memenuhi kelengkapan basis data aplikasi Semantik		100%	100	12	-

Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan,

Rionald Silaban
NIP 19660423 199010 1 001

Manado, 31 Januari 2020

PNS yang dinilai,

Rahmad Gendro Legowo
NIP 19850512 200901 1 003

LAMPIRAN II
LAPORAN REALISASI JAMLATOR BDK MANADO
TRIWULAN IV
TAHUN 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN MANADO

JALAN MAPANGET RAYA KM 0,5 PANIKI, MANADO 95257 TELEPON (0431) 814184, 814183; FAKSIMILE (0431) 814183;
SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-19/BPP.11/2021

Yth : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dari : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Penyampaian Laporan Realisasi Jamlator Pusklat PSDM Bulan Oktober 2020
Tanggal : 12 Januari 2021

Sehubungan dengan penyelenggaraan program pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Jamlator Pusklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 di Balai Diklat Keuangan Manado.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Balai

Ditandatangani secara elektronik
Gendro Legowo

Tembusan:
Sekretaris Badan

**LAPORAN
REALISASI JAMLATOR PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2020
DI BDK MANADO**

Realisasi Jamlator BDK Manado Sampai Bulan September 2020 : 33253

Realisasi Jamlator Non Latsar BDK Manado Sampai Bulan September 2020 : 4113

Realisasi Jamlator Bulan Oktober 2020 :

No	Nama Program Diklat	Waktu Penyelenggaraan		Jumlah Jamlat	Jumlah Peserta		Jamlator
		Mandiri	Klasikal		Total Peserta	Jumlah Peserta Kemenkeu	
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7
1	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I	3 - 11 Februari 2020	12 Februari - 4 Maret 2020	235	62	62	14570
		5 Maret - 11 Mei 2020	12 - 13 Mei 2020				
2	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode II	2 - 9 Maret 2020	10 Maret - 18 April 2020	235	62	62	14570
		18 April - 6 Juli 2020	6 - 7 Juli 2020				
3	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode III	3 - 7 Agustus 2020	11 Agustus - 2 September 2020	235	62	62	14570
		4 September - 16 Oktober 2020	20 - 21 Oktober 2020				
Total							43710

Plt. Kepala Balai,

Rahmad Gendro Legowo

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN MANADO

JALAN MAPANGET RAYA KM 0,5 PANIKI, MANADO 95257 TELEPON (0431) 814184, 814183; FAKSIMILE (0431) 814183;
SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-9/BPP.11/2021

Yth : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak
Dari : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Penyampaian Laporan Realisasi Jamlator Pusediklat Pajak Bulan November 2020
Tanggal : 07 Januari 2021

Sehubungan dengan penyelenggaraan program pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Jamlator Pusediklat Pajak Bulan November Tahun Anggaran 2020 di Balai Diklat Keuangan Manado.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Balai

Angani secara elektronik
Gendro Legowo

Tembusan:
Sekretaris Badan

**LAPORAN
REALISASI JAMLATOR PUSDIKLAT PAJAK
BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2020
DI BDK MANADO**

Realisasi Jamlator BDK Manado Sampai Bulan Oktober 2020 : 47823

Realisasi Jamlator Non Latsar BDK Manado Sampai Bulan Oktober 2020 : 4413

Realisasi Jamlator Bulan November 2020 :

No	Nama Program Diklat	Waktu Penyelenggaraan		Jumlah Jamlat	Jumlah Peserta		Jamlator
		Mandiri	Klasikal		Total Peserta	Jumlah Peserta Kemenkeu	
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7
1	PJJ Penyuluh Perpajakan Angkatan I	-	10 - 14 Agustus 2020	57	30	30	1710
2	PJJ Penanganan Perkara DJP-DJBC	24 - 30 Agustus 2020	1 - 2 September 2020	30	35	35	1050
3	PJJ Penyuluh Perpajakan Angkatan II	-	7 - 11 September 2020	57	29	29	1653
4	PJJ Optimalisasi Pemanfaatan Data sektor Kehutanan	-	2 - 5 November 2020	31	30	30	930
Total							5343

Rahmad Gendro Legowo

LAMPIRAN III
REALISASI DIKLAT BDK MANADO TRIWULAN IV
TAHUN 2020